

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan penyebab belum optimalnya penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP dan dibangun strategi peningkatan penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP.

1. Penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP belum optimal diidentifikasi dari faktor penghambat sebagai berikut:

a. Kemampuan SDM yang Belum Merata

Adakalanya PPK ataupun user belum mengetahui bahwa produk yang dibutuhkan sudah ada yang PDN. Tantangan saat ini adalah bagaimana para SDM PBJ mendapatkan pengalaman yang sama. Selain itu, sekalipun banyak informasi yang diperoleh soal PDN, adakalanya tidak semua informasi juga tersedia. Pada intinya, pemerataan informasi dan pengetahuan soal PDN perlu dilakukan.

b. Keterbatasan Barang/Jasa PDN ataupun substitusinya

Kondisi ini mengacu pada situasi di mana suatu barang/jasa, baik PDN maupun alternatif pengganti dari luar negeri, terbatas ataupun tidak tersedia di pasar. Belum terlihat jelas kewajiban penggunaan PDN sejak tahap identifikasi kebutuhan, bagaimana PPK sebagai Pelaku PBJ yang melaksanakan identifikasi kebutuhan, memastikan ketersediaan barang/jasa atau produk dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan unit organisasi.

c. Kualitas Barang/Jasa PDN yang belum optimal, Harga Barang/Jasa PDN lebih mahal termasuk Isu Sistem Keamanan

Kualitas PDN belum terjamin. Dengan biaya pembelian yang mungkin lebih murah, tetapi juga memakan biaya yang cukup mahal jika terdapat kerusakan. Produk IT yang digunakan LKPP beragam, menjadi tantangan, karena kebutuhan LKPP terhadap IT cukup besar. Saat ini, IT menjadi inti atau core LKPP.

2. Strategi meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di LKPP

a. Internalisasi Kebijakan PDN

SDM PBJ harus memiliki pengetahuan tentang kebijakan penggunaan PDN dan cara melakukan implementasinya. Melalui internalisasi kebijakan PDN, dapat memperkenalkan kebijakan penggunaan PDN kepada SDM PBJ agar SDM PBJ dapat mengimplementasikan kebijakan PDN secara tepat.

b. Optimalisasi Proses PBJ meliputi:

1) Tahap Perencanaan

PPK melakukan identifikasi kebutuhan dan kewajiban penggunaan PDN untuk memastikan ketersediaan barang/jasa atau produk dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan unit organisasi. Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan oleh PPK pada dokumen spesifikasi teknis/KAK.

2) Tahap Persiapan

Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan melakukan reviu terhadap spesifikasi teknis/KAK yang ditetapkan PPK. Dalam melakukan reviu, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan mengakses portal P3DN untuk memeriksa nilai TKDN dan BMP. Hasil reviu dituangkan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.

3) Tahap Pelaksanaan

Pokja Pemilihan memberikan preferensi harga pada proses evaluasi penawaran. Hasil evaluasi dituangkan oleh Pokja Pemilihan pada dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran.

4) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tim Auditor LKPP melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan proses PBJ. Adapun lingkup monitoring dan evaluasinya meliputi kepatuhan terhadap kebijakan PDN dan implementasi kewajiban penggunaan PDN. Melalui kegiatan monitoring evaluasi dapat mengidentifikasi peluang perbaikan pelaksanaan PBJ. Hasil monitoring evaluasi diharapkan memberikan rekomendasi sebagai umpan balik (*feedback*) untuk mencapai hasil yang lebih baik.

- c. Penyusunan dan penyempurnaan sejumlah dokumen untuk memastikan kewajiban penggunaan PDN:
- 1) Penyempurnaan SOP Perencanaan Pengadaan, dalam rangka penguatan kewajiban penggunaan PDN sejak tahap identifikasi kebutuhan barang/jasa untuk memastikan ketersediaan barang/jasa atau produk dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan unit organisasi. Jika produk dalam negeri tersedia, maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan, yaitu dengan memberikan prioritas PDN dalam proses pengadaan.
 - 2) Penyusunan Model Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK, dalam rangka penguatan kewajiban penggunaan PDN sejak tahap perencanaan pengadaan.
 - 3) Penyusunan Model Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, dalam rangka penguatan kewajiban penggunaan PDN sejak tahap persiapan pemilihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, selanjutnya sebagai output dari tujuan penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi beberapa saran dalam rangka optimalisasi penggunaan PDN pada PBJ meliputi:

1. LKPP dalam hal ini KPA, Kepala UKPBJ, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan berkomitmen melaksanakan langkah strategi yang disusun dalam penelitian ini untuk mewujudkan peningkatan penggunaan PDN pada PBJ di LKPP;
2. Saran ini tidak terlepas dari perlunya sinergi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN pada Belanja Barang/Jasa Pemerintah. Diantaranya sebagai berikut:
 - a. LKPP dan Kementerian Perindustrian agar memfasilitasi kolaborasi antara produsen dalam negeri dan juga K/L/PD terkait dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa yang belum tersedia. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan, yaitu business matching yang perlu dihadiri oleh K/L/PD, BUMN/BUMD, serta badan usaha tertentu dan para pelaku usaha dalam negeri.

- b. Kementerian Perindustrian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyusun kebijakan terkait penggunaan Produk Dalam Negeri. Hal ini termasuk kebijakan terkait regulasi, insentif, dan strategi untuk mendorong industri dalam negeri. Untuk itu Kementerian Perindustrian perlu memastikan persiapan yang matang dalam rangka praktik offset agreement untuk pengembangan produk yang belum diproduksi oleh industri dalam negeri.
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait investasi, termasuk kebijakan yang mencakup insentif untuk menggunakan PDN dalam proses produksi. Untuk itu BKPM perlu memastikan terlaksananya kegiatan pembinaan pelaku usaha melalui program pemberian insentif untuk pengembangan PDN yang berbasis inovasi dan riset, terutama untuk industri dengan ketersediaan produk dalam negeri rendah.
- d. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional terkait riset dan inovasi termasuk mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan peningkatan penggunaan PDN dan mendukung riset dan inovasi lokal yang berfokus pada pengembangan dan produksi PDN. Untuk itu BRIN perlu memastikan peningkatan hasil riset dalam rangka pengembangan produk dalam negeri untuk menjadi produk substitusi impor.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menggali faktor-faktor lain yang mungkin belum tercakup dalam penelitian ini, khususnya dalam cara ataupun strategi mengatasi keterbatasan kebutuhan PDN yang belum tersedia tersedia di pasar, termasuk produk substitusinya.

DAFTAR PUSTAKA

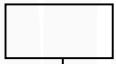
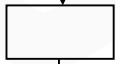
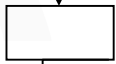
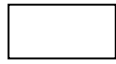
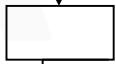
- Badan Pusat Statistik. (2021). Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen. (Situs web <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>).
- BEI, L. T., & Widdows, R. (1999). Product knowledge and product involvement as moderators of the effects of information on purchase decisions: A case study using the perfect information frontier approach. *Journal of Consumer Affairs*, 33(1), 165-186.
- Boyle, G. (2014). *Australian Refrigeration and Air Conditioning Vol 2*. West Perth: West One Services Companies Inc.
- Brucks, Merrie (1984). The Effects of Product Class Knowledge on Information Search Behavior. *Journal of Consumer Research*, 12: 1-15.
- Caiden, N.J. (1981). Public Budgeting Amidst Uncertainty and Instability. *Public Budgeting & Finance*, 1, 6-19.
- Deringer, H., Erixon, F., Lamprecht, P., & Van der Marel, E. (2018). The economic impact of local content requirements: a case study of heavy vehicles (No. 1/2018). ECIPE Occasional Paper.
- Ettmayr, C. (2016). *Local Content Requirements and the Impact on the South African Renewable Energy Sector* (Doctoral dissertation, Nelson Mandela Metropolitan University).
- Fitzsimmons, James A. dan Fitzsimmons, Mona J. (1994.). *Service Management for Competitive Advantage*. New York: McGraw- Hill.
- Francesco, M. D., & Alford, J. (2016). *Balancing Control and Flexibility in Public Budgeting*. Springer.
- Granof, M. H., Khumawala, S. B., & Calabrese, T. D. (2016). *Government and not-for-profit accounting: Concepts and practices*. John Wiley & Sons.
- Gunadi, Sutiono. (2020). "Apa itu Commissioning?". Jakarta. Kompasiana.com. (Situs web https://www.kompasiana.com/sutiono/5faa2c509b7830444f1e9d53/apa-itu-commissioning?page=2&page_images=1).
- Hansen, U. E., Nygaard, I., Morris, M., & Robbins, G. (2019). Local content requirements in auction schemes for renewable energy: Enabler of local industrial development in developing countries? UNEP DTU Partnership Working Paper Series 2019 No. 2.
- Harrison A. & Van Hoek, R. (2002). *Logistics Management and Strategy*. Pearson Education Limited.
- Hartono, G., & Santoso, E. (2013). Analisis penetapan strategi peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada industri manufaktur di Indonesia: Studi kasus pada komponen kopling. INASEA.
- Hufbauer, G. C., Schott, J. J., & Cimino-Isaacs, C. (2013). *Local content requirements: A global problem* (Vol. 102). Columbia University Press.
- Hugos, Michael M. (2003). *Essentials of Supply Chain Management*. Amerika Serikat: John Wiley & Sons.
- Holzer, M., & Schwester, R. W. (2011). *Public administration: An introduction*. Routledge.
- FS-Institute. (2023). *Membuat Register Risiko Sederhana*. Jakarta. (Situs web <https://fs-institute.org/register-risiko-sederhana/>)

- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan PDN dan Produk UMKK dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kamesworo, S. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian (Doctoral dissertation, IPB University).
- Kartika, D. (2020). Dampak Penerapan E-Procurement Terhadap Kasus Korupsi Pengadaan Publik Indonesia Dan India. *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 11 No.2, 2020.
- Kraljic P. (1983). Purchasing must become supply management. *Harvard Business Review*, p. 109-117.
- Kaziboni, L., & Stern, M. (2021). The impact of local content policies on South Africa: Drawing lessons from foreign investors' experience of the PPPFA and REIP4. In Paper for the TIPS Forum.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Prinsip-prinsip pemasaran. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. Pearson.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021.
- Meindl, P., dan Chopra, S. (2005). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson Education International/Prentice Hall.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.
- OECD. (2016). Preventing Corruption in Public Procurement.
- OECD. (2019). Government at a Glance 2019. OECD Publishing, Paris.
- OECD. (2019). The economic impact of local content requirements. Trade Policy Brief, February 2019.
- OECD. (2002a). "Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management." Paris: OECD/ DAC.
- OSS Kementerian Investasi/BKPM. (Situs web <https://oss.go.id/>)
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). (Situs web <http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php>)
- Rao, A. R., & Monroe, K. B. (1988). The moderating effect of prior knowledge on cue utilization in product evaluations. *Journal of consumer research*, 15(2), 253-264.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2015). Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector. Routledge.
- Schooner, S. L. (2002). Desiderata: Objectives for a system of government contract law. *Public Procurement Law Review*, 11, 103.
- Siaran Pers Kementerian Perindustrian. (2022). Genjot P3DN, Menperin Pimpin Implementasi Belanja Produk Dalam Negeri. (Situs web <https://kemenperin.go.id/artikel/23152/Genjot-P3DN,-Menperin-Pimpin-Implementasi-Belanja-Produk-Dalam-Negeri>).

- Siswanto. (2017). Mencintai Produk Dalam Negeri Sebagai Manifestasi Bela Negara Di Era Global. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* Desember 2017, Volume 7 Nomor 3.
- Sondang Silitonga, M. (2018). *Corruption in Indonesia: The Impact of institutional change, norms, and networks*. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen keuangan pemerintahan*. Graha Ilmu.
- Suparmoko, M. (2013). *Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek (6th ed.)*. Yogyakarta: BPFE.
- T, Y, Lee, “The development of ISO 9000 certification and the future of quality management,” *International Journal of Quality and Reliability Management*, 1998, 15 (2), pp. 162–177.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- United Nations. (1999). “Transparency in Government.” Presentation for International Law Enforcement Academy (ILEA) Seminar (July 20). <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan012062.pdf>
- Van der Vorst, J. (2004). *Supply Chain Management: Theory and Practices*. IN: CAMPS, T. et al. *The Emerging World of Chains and Networks: Bridging Theory and Practice*. Den Haag: Red Business Information.
- Weiss, L., & Thurbon, E. (2006). *The business of buying American: Public procurement as trade strategy in the USA*. *Review of International Political Economy*.
- Wells, J., & Hawkins, J. (2010). *Increasing ‘local content’ in infrastructure procurement. Part 1. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Management, Procurement and Law*.
- Willoughby, K. G. (2014). *Public budgeting in context: Structure, law, reform and results*. John Wiley & Sons.
- Wilson, James. (1967). “The Bureaucracy Problem”. *The Public Interest* (Winter), pp. 3–9. 17.
- Wirtz, J., & Mattila, A. S. (2003). *The effects of consumer expertise on evoked set size and service loyalty*. *Journal of Services Marketing*, 17(7), 649-665.
- Y, Frimpong, J, Oluwoye, L, Crawford. (2003). “Causes of delay and cost overrun in construction of groundwater projects in development countries; Ghana as a case study,” *International Journal of Project Management*, 21(5), pp.321-326.
- Zakaria, A. H., Firdaus, F., Arifin, K. F., Munawar, M. S., & Gunawan, A. (2023). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tkdn (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik*. *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol, 6(1).

Lampiran I Penyempurnaan SOP Perencanaan Pengadaan

Rencana Penyempurnaan SOP Perencanaan Pengadaan

No	Aktivitas	Pelaksana		Keterangan
		PA/KPA	PPK	
1 s.d 4	Aktivitas 1 s.d 4 pada SOP Perencanaan eksisting			
5	Melakukan identifikasi kebutuhan			<p>a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>b. PPK memastikan ketersediaan Barang/Jasa PDN untuk memenuhi kebutuhan. Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan oleh PPK pada dokumen spesifikasi teknis/KAK.</p> <p>c. PPK melaksanakan <i>product knowledge</i> untuk penguatan riset pasar.</p>
6	Mengakses website yang dikelola oleh Kemenperin untuk memeriksa nilai TKDN dan BMP			<p>a. Dalam hal terdapat PDN yang memiliki nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%, maka PPK wajib menggunakan PDN dengan nilai TKDN paling sedikit 25%;</p> <p>b. Dalam hal tidak tersedia PDN yang memiliki nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%, maka PPK menggunakan PDN dengan nilai TKDN paling sedikit 25%;</p> <p>c. Dalam hal PDN pada huruf a dan b tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka PPK menggunakan PDN dengan nilai TKDN kurang dari 25%;</p> <p>d. Dalam hal PDN pada huruf a, b dan c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka PPK menggunakan PDN yang dinyatakan oleh pelaku usaha (<i>self declare</i>)</p>
7 s.d 10	Aktivitas 7 s.d 10 pada SOP Perencanaan eksisting			
11	Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRUP.			PA/KPA memastikan Perencanaan Pengadaan yang disusun oleh PPK telah mewajibkan penggunaan PDN

Lampiran II Penyusunan Model Dokumen Berita Acara Reviu DPP

Model Dokumen Berita Acara
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP)
Paket Pengadaan
Nomor:

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun telah dilakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan bertempat di untuk Paket Pengadaan

Hasil Reviu sebagai berikut:

1. Reviu terhadap Spesifikasi Teknis

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
PPK dalam menyusun Spesifikasi Teknis Barang/Jasa menggunakan:		
1	Produk Dalam Negeri	
2	Produk Bersertifikat SNI	
3	Produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	
4	Produk Ramah Lingkungan	

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Memeriksa Mutu/Kualitas yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan	
2	Spesifikasi Jumlah yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan	
3	Spesifikasi Tingkat Layanan yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan (apabila diperlukan)	
4	Spesifikasi Waktu yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan	
5	Spesifikasi Lokasi/Tempat Pengiriman yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan	

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

Apabila dalam spesifikasi teknis yang disusun oleh PPK belum menggunakan PDN, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan wajib memberikan rekomendasi/catatan terkait kewajiban Penggunaan PDN

2. Reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Memeriksa apakah nilai total HPS tidak melebihi pagu anggaran.	
2	Memeriksa apakah unsur pembayaran sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan lingkup pekerjaan.	
3	Memeriksa apakah nilai total HPS telah memperhitungkan kewajiban pajak.	
4	Sumber informasi harga jelas dan dapat dipertanggungjawabkan	
5	Komponen biaya yang dibutuhkan sudah mencakup kebutuhan dan/atau menghilangkan komponen yang tidak diperlukan sesuai informasi harga, seperti: biaya pengiriman, keuntungan dan biaya overhead, biaya instalasi, suku cadang, biaya operasional dan pemeliharaan, atau biaya pelatihan yang diperlukan.	
6	Kalkulasi perhitungan dapat dinilai wajar	
7	Riwayat penyusunan dan perhitungan terdokumentasi dengan baik	
8	Masa atau waktu perhitungan dan penetapan terpenuhi	

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

--

3. Reviu terhadap Rancangan Kontrak

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Memeriksa apakah Surat Perjanjian sudah dituangkan secara lengkap dan benar terkait paket pengadaan, sumber dana, jenis kontrak, waktu pelaksanaan	
2	Memeriksa apakah jenis kontrak dalam Surat Perjanjian sudah sesuai dengan dokumen lainnya	
3	Memeriksa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)	•
4	Memeriksa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)	

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

--

4. Reviu terhadap Anggaran Pengadaan

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	DIPA atau RKA-KL sudah ditetapkan.	

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
2	Anggaran untuk pekerjaan sudah tersedia dan memadai.	
3	Mata Anggaran/MAK telah sesuai dan dapat direalisasikan.	

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

--

5. Reviu terhadap Rencana Umum Pengadaan

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Memeriksa ID Paket RUP apakah sudah tersedia	
2	Memeriksa kesesuaian dengan metode pemilihan di RUP	
3	Memeriksa apakah Paket Pengadaan merupakan barang/jasa yang dapat dikonsolidasikan	

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

--

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

6. Reviu terhadap Analisa Pasar

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Memastikan ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.	
2	Menentukan target pasar.	

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan memeriksa telah dilakukannya Analisa Pasar untuk memastikan PDN yang mampu dan memenuhi persyaratan

7. Reviu Terhadap Kualifikasi Penyedia

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Memeriksa apakah syarat kualifikasi penyedia sudah ditentukan dengan jelas dan tidak memberatkan calon penyedia	
2	Memeriksa kualifikasi personil sudah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku	

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

--

Demikian Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ini dibuat pada hari, tanggal sebagaimana tersebut di atas. Apabila diperlukan, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan PPK serta Tim Teknis dapat melakukan reviu lanjutan.

Menetapkan,
Kelompok Kerja Pengadaan

Lampiran III Penyusunan Model Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK

MODEL DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN

Uraian Pendahuluan ¹	
Latar Belakang	
Maksud dan Tujuan	
Sasaran	
Lokasi Kegiatan	
Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: _____
Kode RUP	
Nama dan Organisasi PPK	Nama PPK: _____ Satuan Kerja: _____
Data Penunjang ²	
Data Dasar	
Standar Teknis	
Studi-Studi Terdahulu	
Referensi Hukum	
Ruang Lingkup	
Lingkup Kegiatan	
Produksi Dalam Negeri	Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia.

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Keluaran ³			
Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK			
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi			
Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa			
Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan			
Personel	Posisi	Kualifikasi	Jumlah
	Tenaga Ahli:		
Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan			
Laporan			
Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan memuat: _____ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (_____) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (_____) buku laporan.		
Laporan Bulanan	Laporan Bulanan memuat: _____ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (_____) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (_____) buku laporan.		
Laporan Antara	Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: _____ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (_____) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (_____) buku laporan.		

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

Laporan Akhir	Laporan Akhir memuat: _____ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (_____) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (_____) buku laporan dan cakram padat (<i>compact disc</i>) (jika diperlukan).
Hal-Hal Lain	
Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja PPK berikut:
Apabila Tidak Menggunakan Produksi Dalam Negeri	[Diuraikan dasar/pertimbangan/penyebab/ketentuan apabila tidak menggunakan Produksi Dalam Negeri]

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran IV Surat Permohonan Izin Penelitian



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996
Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

Nomor : 665/STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 14 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Plt. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta 12940

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Juniarty Erika Magdalena Saragi
NPM : 2143021108
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik,



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan;
4. Mahasiswa Ybs;
5. Pertinggal.

Lampiran V Surat Keterangan Selesai Penelitian



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 25445/UKPBJ/09/2023 18 September 2023
Hal : Penyampaian Telah Menyelesaikan Penelitian Tugas Akhir an. Juniarty Erika
Magdalena Saragi

Yth. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
di Jakarta

Sebagaimana Surat Dinas Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor: 665/STIA.1.1/PPS.02.3 tanggal 14 April 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, kami telah menyetujui dan penelitian tersebut telah dilaksanakan.

Selanjutnya dengan ini kami sampaikan bahwa pegawai sekaligus mahasiswa Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, sebagai berikut:

Nama : Juniarty Erika Magdalena Saragi
NPM : 2143021108
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP

Telah menyelesaikan penelitiannya di Instansi kami dalam rangka penulisan tugas akhir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muhammad Adiwibowo Soedarmo



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : QMqKoJ
Nomor Tiket : SK202309180009

Lampiran VI Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS



I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Juniarty Erika Magdalena Saragi
2. Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 23 Juni 1989
3. NPM : 2143021108
4. Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara (MKN)
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Alamat Rumah : D'Palm Residence Depok 16439
7. Nomor Kontak : 0878-8021-1202
8. Email : erika.lkpp@gmail.com
9. Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
10. Alamat Kantor : Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 15 Cempaka Putih Barat Jakarta Lulus Tahun 2001

SMP Negeri 77 Cempaka Putih Tengah Jakarta Lulus Tahun 2004

SMA Negeri 1 Cibinong Lulus Tahun 2007

Sarjana (S1) Universitas Negeri Jakarta Lulus Tahun 2012

III. RIWAYAT PEKERJAAN

2015 - 2017 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

2017 - 2021 Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat

2021 - saat ini

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Kemampuan Bahasa : Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Judul Tugas Akhir : Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pembimbing Tugas Akhir : 1. Dr. Hamka, MA
2. Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran VII Instrumen Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

I. DATA RESPONDEN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Pendidikan :
4. Jenis Kelamin :
5. Usia :

II. DAFTAR PERTANYAAN

No.	Uraian	Pertanyaan	Informan
1	Siklus/ Tahap Pengadaan		
	a. <i>Project Identification/ Identifikasi Kebutuhan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses penyusunan identifikasi PBJ di LKPP? 2) Sejauh mana identifikasi kebutuhan yang dilakukan di LKPP sudah mewajibkan penggunaan PDN? 3) Sejauh mana identifikasi kebutuhan yang dilakukan di LKPP sudah mengutamakan penggunaan PDN? 4) Apa saja tantangan/kendala yang muncul? Bagaimana menghadapinya? 	KPA, PPK
	b. <i>Procurement Strategy/ Strategi Pengadaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana strategi pengadaan yang dilakukan di LKPP? 2) Bagaimana arah kebijakan implementasi percepatan belanja penggunaan produk dalam negeri serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) termasuk personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berada di bawah koordinasi KPA? 3) Apakah implementasi pelaksanaan penggunaan PDN di Lingkungan 	KPA

No.	Uraian	Pertanyaan	Informan
		<p>LKPP sudah terlaksana sesuai dengan arahan yang diberikan?</p> <p>4) Bagaimana arah kebijakan implementasi percepatan belanja penggunaan PDN serta fungsi layanan administrasi keuangan dan administrasi pengadaan (UKPBJ) termasuk personil PPK berada dibawah koordinasi Sekretaris Utama?</p> <p>5) Apakah strategi pengadaan yang dilakukan di LKPP sudah mewajibkan penggunaan PDN?</p> <p>6) Apakah LKPP telah mendukung pencapaian target belanja PBJ paling sedikit Rp400 Triliun untuk PDN?</p> <p>7) Apa saja tantangan/kendala yang muncul? Bagaimana menghadapinya?</p>	
	<p>c. <i>Appointment of consultant(s)/ Pemilihan Penyedia</i></p>	<p>1) Bagaimana proses pemilihan konsultan pada PBJ yang dilakukan di LKPP?</p> <p>2) Sejauh mana proses dan persyaratan konsultan yang dilakukan di LKPP mewajibkan penggunaan PDN?</p> <p>3) Sejauh mana proses dan persyaratan konsultan yang dilakukan di LKPP mengutamakan penggunaan PDN?</p> <p>4) Sejauh mana LKPP telah memberikan preferensi harga untuk pengadaan PDN yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?</p> <p>5) Apa saja tantangan/kendala yang muncul? Bagaimana menghadapinya?</p>	<p>Pokja Pemilihan</p>
	<p>d. <i>Design and Specification/ Penyusunan Spesifikasi</i></p>	<p>1) Bagaimana proses penyusunan spesifikasi teknis di LKPP?</p> <p>2) Sejauh mana spesifikasi teknis yang ditetapkan di LKPP sudah mewajibkan penggunaan PDN?</p> <p>3) Sejauh mana spesifikasi teknis yang ditetapkan di LKPP sudah mengutamakan penggunaan PDN?</p>	<p>PPK</p>

No.	Uraian	Pertanyaan	Informan
		4) Apa saja tantangan/kendala yang muncul? Bagaimana menghadapinya?	
	<i>e. Appointment Contractor/ Pemilihan Penyedia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses pemilihan kontraktor/ pekerjaan konstruksi pada PBJ yang dilakukan di LKPP? 2) Sejauh mana proses dan persyaratan kontraktor yang dilakukan di LKPP sudah mewajibkan penggunaan PDN? 3) Apa saja tantangan/kendala yang muncul? Bagaimana menghadapinya? 	Pokja Pemilihan
	<i>f. Contract Agreement, Monitoring and Evaluation/ Pelaksanaan Kontrak, Monitoring dan Evaluasi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses pelaksanaan kontrak pengadaan di LKPP? 2) Sejauh mana LKPP sudah mewajibkan penggunaan PDN pada setiap kontrak PBJ? 3) Apa saja tantangan/kendala yang muncul? Bagaimana menghadapinya? 	PPK
	<i>g. Commissioning and Handover / Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses serah terima barang/jasa yang dilakukan di LKPP? 2) Bagaimana PPK memastikan bahwa barang/jasa yang disampaikan/diserahkan oleh penyedia barang/jasa sudah memenuhi penggunaan PDN? 3) Apa saja tantangan/kendala yang muncul? Bagaimana menghadapinya? 	PPK
	<i>h. Operation and Maintenance/ Pemeliharaan Pekerjaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses pemeliharaan barang/jasa yang dilakukan di LKPP? 2) Bagaimana PPK memastikan bahwa pada proses pemeliharaan barang/jasa sudah memenuhi penggunaan PDN? 3) Apa saja tantangan/kendala yang muncul? Bagaimana menghadapinya? 	PPK
2	Faktor-Faktor yang mempengaruhi PDN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di LKPP? 2) Dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, faktor mana yang mendorong penggunaan PDN? 	Seluruh Informan

No.	Uraian	Pertanyaan	Informan
		3) Dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, faktor mana yang menghambat penggunaan PDN?	
3	Strategi PDN	1) Bagaimana strategi yang efektif dalam meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di LKPP? 2) Apa saja tantangan/kendala yang muncul? Bagaimana menghadapinya?	Seluruh Informan
4	Pemantauan Evaluasi PDN	1) Bagaimana proses Monitoring dan Evaluasi P3DN mempunyai tugas, yaitu monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan PDN pada PBJ pemerintah sejak tahapan perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan PBJ? 2) Apakah fungsi pengawasan yang dilaksanakan Tim Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pemantauan Evaluasi P3DN berada dibawah koordinasi Inspektur sudah berjalan dengan maksimal? 3) Apa saja tantangan/kendala yang muncul dalam proses pengawasan? 4) Apa saja strategi pengawasan yang diterapkan untuk Pemantauan Evaluasi Percepatan Penggunaan PDN di LKPP? 5) Bagaimana proses penilaian sehingga pengawasan dapat dikatakan berhasil? 6) Apa saja kendala yang sering muncul?	Auditor sebagai Tim Pemantauan Evaluasi PDN

No.	Uraian	Pertanyaan	Informan
5	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1) Bagaimana gambaran pelaksanaan PBJ di LKPP? 2) Bagaimana arah strategi pengadaan di LKPP berkaitan dengan PDN?	Kepala UKPBJ



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA